



STRATEGI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

LOCAL LEADERS ELECTION STRATEGY ON SITUATION COVID-19 PANDEMIC IN OGAN KOMERING ULU REGENCY

Dian Novitasari¹, Bianca Virgiana²

^{1,2}Universitas Baturaja

diannovitasari.as@gmail.com¹, virgiana.bianca@gmail.com²

ABSTRAK

Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak maret 2020 ini, mengakibatkan perubahan diberagam sektor kehidupan. Mulai dari kebiasaan hidup sehari-hari, interaksi sosial di masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk salah satunya perubahan dalam pemilihan kepala daerah. Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satu daerah yang dijadwalkan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Proses pilkada yang dilangsungkan ditengah pandemi covid-19 dibayangi dengan beragam kendala, untuk itu diperlukan sinergisitas dari berbagai pihak berwenang agar pemilihan kepala daerah dapat tetap menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat secara demokratis namun harus dijaga ketat agar berlangsung sesuai protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran virus covid-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemilihan kepala daerah ditengah situasi pandemi covid-19 di Kabupaten OKU. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dengan informan KPU, Bawaslu, dan masyarakat di Kabupaten OKU. Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi untuk meningkatkan partisipasi politik dengan Sosialisasi pilkada dilakukan dengan jumlah peserta terbatas dan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial instagram dan facebook, serta penyiaran pesan ajakan untuk berpartisipasi dalam pilkada secara berulang-ulang melalui media radio lokal, dan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam diskusi yang dikemas dengan acara NGOPI (Ngobrol Pilkada).

Katakunci: Pilkada, Pandemi, Strategi

ABSTRACT

The Situation covid-19 pandemic in Indonesia which has been going on since 7 march 2020, succesfully changed various sectors of life. Strating from the habits, social interactions, the life of the nation , and the changed in regional head election is no exception. Ogan Komering Ulu Regency was one of the regions scheduled to hold regional head election is no exception. Ogan Komering Ulu Regency was one of the regions schedule to hold regional head elections. The election process which was hold in the midst of the covid-19 pandemic was overshadowed by various obstacles, for this reason, synergy from various authorities was needed so that the regional head election could remain a suggestion for democratically channeling people's aspirations but must be strictly maintaindes so that it took place according to health protoclms in order to prevent the spread of the covid-19 virus. This study aimed to analyze the strategy of regional head elections . The type of research was qualitative descriptive with in-depth interviews with KPU, Bawaslu, and community informants in Ogan Komering Ulu regency. The result of the study found that the strategy to increase political aperticipation by socializing the election was carried out with a limited number of paticipants and mostly carried out using social media instagram and facebook, as well as broadcasting invitations to participate in the elections repeatedly through local radio media to accommodate people's aspirations in discussions which was packaged in the NGOPI (Ngobrol Pilkada).

Keywords: Local Leaders Elections, Pandemic, Strategy

DOI :<https://doi.org/10.23960/metakom.v5i2.205>

PENDAHULUAN

Pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada 9 desember 2020 yang sudah terencana salah satunya akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) provinsi Sumatera Selatan, namun pesta demokrasi yang sudah direncanakan sekian lama menjadi berbeda ditengah situasi pandemic covid-19. Menghadapi situasi pandemic covid-19 selama kurang lebih tujuh bulan terakhir bukanlah sesuatu yang mudah, beragam sektor kehidupan mau tidak mau harus turut mengalami perubahan. Pemilihan Umum kepala daerah dikabupaten Ogan Komering ulu harus disiapkan sedemikian rupa agar tetap dapat berlangsung ditengah situasi pandemi covid-19 yang tentunya harus memberikan porsi perhatian ekstra pada protokol kesehatan demi menjaga agar kelangsungan Pilkada di kabupaten Ogan Komering ulu tidak menambah panjang rantai penyebaran virus covid-19, sembari memastikan bahwa prses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung maksimal dan mengakomodir suara masyarakat dapat tersalurkan dalam proses demokrasi.

Beragam kendala menjadi momok yang membayangi proses pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan sinergi dari berbagai pihak terkait untuk melaksanakan proses Pilkada yang demokratis namun tetap memperhatikan protokol kesehatan “peraturan KPU terkait protokol pelaksanaan pilkada di situasi pandemi memiliki relevansi dan signifikansi yang kuat. Kendati demikian, tantangan berat penyelenggaraan pilkada di momen pandemi ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan pilkada berhasil”(Sarjan,et al.2020). Rencana Pilkada serentak 9 desember 2020 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat salah satunya adalah karena ketakutan masyarakat akan penyebaran virus covid-19 yang akan semakin meluas jika masyarakat turut serta dalam proses penyampaian aspirasi dalam pesta demokrasi, sehingga ditakutkan akan muncul cluster pilkada. Beragam spekulasi bermunculan, salah satunya adalah masyarakat terpaksa Golput dalam pemilihan kepala daerah kali ini karena ketakutan terbesar akan tertular virus covid19 selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung dikabupaten ogan komering ulu, untuk itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini, komisi pemilihan umum daerah, Bawaslu, Pemerintah kabupaten ogan komering ulu dan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tinjauan Pustaka

Menurut Peter Scrooder (2009:24) “Strategi adalah teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan”. Sedangkan Pengertian Politik menurut Mitchell (dalam Pureklolon, 2016:94)”politik merupakan pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”, sedangkan menurut Plano dkk (dalam pureklolon, 2016:19), Politik dapat diartikan sebagai “seni memerintah, seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin, penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan dan persaingan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat”.

“Komunikasi Politik dapat disimpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik atau sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah” (Pureklolon, 2016:95). Selanjutnya lebih dalam Pureklolon (2016:95) menyatakan bahwa “Analisis Politik merupakan penyebaran aksi, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan dan lainnya”

“Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuassn, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban, jika disederhanakan lagi, sama halnya dengan kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*), kewenangan dan pengaturan, merupakan keseimbangan atau konsekuensi logis” (Soyomukti. 2013:17).

Miriam Budiharjo (dalam Soyomukti, 2013:17-18) mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut”.

“Memiliki sumber daya belum tentu berarti mampu mempengaruhi orang lain. Dengan artian kekuasaan tidak akan dapat diraih apabila sumberdaya yang sebenarnya telah ada atau dimiliki hanya didiamkan saja. Jadi dalam hal ini sumber daya bersifat potensial” (Soyomukti, 2013: 19)

Sosialisasi Politik didefinisikan sebagai “Proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau subkelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas sistem politik dan kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk intitusional dari pengawasan” (Subiakto dan Rachmah. 2014:63).

“Dengan sosialisasi politik yang diberikan kepada individu, maka diharapkan akan memunculkan kesadaran politik individu untuk tidak hanya diam, tetapi melakukan aktivitas yang termasuk dalam partisipasi politik warga Negara meliputi pemberian suara (*voting*),

menandatangani petisi, atau demonstrasi”(Subiakto dan Rachmah. 2014:71). Seperti yang sarikan dari kutipan diatas, melalui sosialisasi politik yang dilakukan kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat melakukan partisipasi politik, yang dalam hal ini berupa pemberian suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Demokrasi sangat mahal biayanya, karena membangun demokrasi sama dengan membangun peradaban. Demokrasi bukan hanya peristiwa pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang berhak memilih, lebih luas dari itu demokk-bentuk instutراسi harus diikuti kedewasaan berpolitik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dilaksanakan secara jujur dan terbuka” (Cangara.2009:266).

Pilkada sendiri di mata masyarakat seringkali hanya dianggap sebagai ajang perebutan kekuasaan dari para elit politik, seperti yang dinyatakan Cangara (2009:266) “pilkada dimata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elite lokal untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan”.

Menurut Cangara (2009:263) kerawanan yang bisa memicu sumber konflik dalam pemilihan kepala daerah ditingkat provinsi atau kabupaten/ kota, antara lain:

1. Dampak pemekaran daerah sehingga menjadi ajang perebutan kekuasaan di kalangan elite politik local
2. Ketidakeimbangan populasi antara penduduk asli dengan para pendatang yang relatif besar jumlahnya
3. Isu money politik disebabkan tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang relatif rendah
4. Fanatisme golongan dan keluarga sangat menonjol sehingga kadang tidak rasional dan menimbulkan sikap siap menang tapi tidak siap kalah
5. Sikap para saksi dan wakil partai yang mengusung calon tidak mau menandatangani berita acara perhitungan suara
6. Kekurangpahaman terhadap metode riset ilmiah *quick count* sehingga cenderung menolak hasil perhitungan dengan melakukan perhitungan sendiri yang kurang didasari keakuratan data Administrasi kependudukan yang tidak tertib sehingga menimbulkan banyak protes atas “surat panggilan pilkada” yang tidak mereka terima, atau ada tetapi dicoblos orang lain.

Gerald Marwell dan David Schmitt (dalam Littlejohn, 2009:177) menggunakan sebuah metode penukaran teori sebagai dasar untuk model perolehan pemenuhan kebutuhan. “seseorang akan patuh dalam penukaran sesuatu yang disediakan oleh orang lain. Metode penukaran yang sering digunakan dalam teori sosial menyisakan kesimpulan bahwa manusia

bertindak untuk meraih sesuatu dari orang lain sebagai penukaran untuk sesuatu yang lain. Model ini berorientasi pada kekuasaan”.

Dari 16 prinsip Gerald dan Schmitt, peneliti memilih 6 strategi untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, pemilihan strategi tersebut dianggap tepat sebagai strategi Strategi Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di kabupaten Ogan Komering Ulu Ke enam strategi tersebut antara lain:

1. Janji (*promising*)
2. Ancaman (*threatening*)
3. Tawaran (*Pregiving*)
4. Mengarah pada kewajiban moral (*Making moral appeals*)
5. Mengetahui hasil positif (*showing expertise about positif outcomes*)
6. Mengetahui hasil negatif (*showing expertise about negatif outcomes*)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana suatu cara untuk penggalian dan pemahaman makna individu atau kelompok yang berasal dari suatu permasalahan manusia dan sosial, di mana proses penelitiannya terkait dengan pemunculan pertanyaan dan prosedur, data yang di peroleh dari suatu keadaan partisipan tertentu, membangun analisis data secara induktif dari tema-tema yang khusus menuju sesuatu yang bersifat umum, dan peneliti membuat intepretasi makna yang berasal dari data yang diperoleh (Creswell, 2009: 4).

Penelitian ini berfokus pada analsisi strategi Pemilihan Kepala daerah (pilkada) ditengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dalam suatu bentuk penelitian kualitatif yang lebih menekankan relevansi pada topik (Flick, 1998: 48) dan perolehan informasi yang kaya mengenai mengenai suatu kasus tertentu (West & Turner, 2008: 75), maka penelitian ini lebih menggunakan *nonprobability* atau *nonrandom samples*, yaitu peneliti tidak menentukan suatu ukuran sample tertentu di mana penelitian akan dilakukan (Neuman, 2006: 220). Karena menurut Creswell (2009: 178) ide dibalik penelitian kualitatif adalah pemilihan partisipan (informan) atau dokumen/visual dengan maksud tertentu yang paling membantu peneliti dalam memahami masalah dan pertanyaan penelitian.

Sejalan dengan acuan *nonprobability* atau *nonrandom samples* dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan menggunakan jenis *purposive* atau *judgmental sampling* (Neuman, 2006: 220), yang biasanya digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*)

atau penelitian yang bersifat penyelidikan (*exploratory*) di mana peneliti menggunakan berbagai metode yang dimungkinkan dapat menjangkau sesuatu yang sukar untuk didapatkan (Neuman, 2006: 222).

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yakni hasil wawancara mendalam (*deep interview*) yang dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah , Bawaslu, dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data penelitian sekunder dalam penelitian ini yang berbentuk dokumen-dokumen pendukung yang dapat memberikan kontribusi pada analisis data primer. Selain melakukan wawancara mendalam, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan data-data yang bersifat tertulis, foto maupun data visual (Patton, 2002: 4); (Baxter & Babbie, 2004: 59), sebagai data tambahan atau penguat dalam menggambarkan permasalahan penelitian yang sekiranya tidak bisa diwakili dengan data verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Narasumber dari KPU, Bawaslu dan Pengamat Politik ditemukan bahwa proses Pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2020 di kabupaten Ogan Komering Ulu didapatkan strategi pemilihan kepala daerah yang diadaptasi dari langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk melaksanakan proses pilkada, sudut pandang pengawasan pilkada dari Bawaslu, hingga hasil pengamatan dari kacamata masyarakat bahwa proses pilkada ditengah situasi pandemi covid-19 di kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan dengan cukup lancar dengan tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan.

Proses pelaksanaan pilkada sempat tertunda, seharusnya pilkada OKU dilaksanakan lebih awal dari tahun 2020, namun karena dampak pandemi covid-19, sehingga pelaksanaan pilkada diundur. Permasalahan dilapangan yang dihadapi oleh KPU OKU selain calon tunggal melawan kolom kosong yang membuat pilihan masyarakat untuk melaksanakan demokrasi dalam pilkada semakin sedikit, yang kedua adalah situasi pandemi covid-19. KPU OKU sudah melaksanakan regulasi sesuai dengan yang diarahkan oleh KPU RI, dengan berusaha semaksimal mungkin menyosialisasikan agar tingkat partisipasi dalam mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah akan timbul di OKU. Namun pada akhirnya partai politik memutuskan untuk mengusung 1 pasangan calon saja dan calon perseorangan (independen) gagal lolos sebagai calon peserta pilkada pada saat itu. Sosialisasi Pilkada dilakukan dengan tatap muka langsung dalam situasi pandemi ini, jumlah peserta sosialisasi dibatasi, kemudian

sosialisasi banyak dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, facebook dan juga disampaikan secara berulang-berulang melalui radio.

KPU juga mengadakan diskusi dengan para stakeholder yang dikemas dalam acara "NGOPI (Ngobrol Pilkada). Acara NGOPI ini dilaksanakan dengan mengundang awak media yang diwakili oleh para pemimpin redaksi dari masing-masing media cetak, media elektronik dan media digital, lalu setelah itu diajak juga tokoh-tokoh masyarakat, pengamat politik juga, dan tokoh-tokoh adat. Hal ini menjadi salah satu alat kontak KPU untuk menyampaikan dan menargetkan bahwa partisipasi pemilih harus tinggi sesuai target dari KPU RI sebanyak 77,5% tingkat partisipasi pemilih. KPU OKU menargetkan 79% tetapi capaiannya hanya 74%, dibawah target yang ditentukan oleh KPU RI, tetapi lumayan tinggi untuk partisipasi politik di kabupaten OKU. Hambatan pilkada OKU yang adalah calon tunggal melawan kolom kosong dan kondisi cuaca hujan seharian pada tanggal 9 desember 2020 pada hari pemilihan itu termasuk faktor penentu berkurangnya partisipasi pemilih. KPU Sudah berupaya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pilkada OKU dengan melakukan sosialisasi langsung dalam jumlah terbatas, penyampaian pesan melalui media konvensional radio dan media sosial instagram, facebook, mengadakan diskusi dengan tokoh masyarakat melalui acara "NGOPI (Ngobrol Pilkada) dan juga mengadakan lomba swafoto di TPS pada saat pilkada berlangsung guna menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Sebagai bentuk antisipasi bagi para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa diajak untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan pilkada seperti kecelakaan hingga meninggal dunia.

Bawaslu sebagai pengawas KPU dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten OKU melihat secara keseluruhan strategi yang dilakukan KPU untuk melaksanakan pilkada di kabupaten OKU ini sudah berjalan sesuai dengan aturan perundangan-undangan pemilu dan regulasi lainnya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam situasi pandemi covid-19, namun dalam hal teknis pelaksanaan tahap-tahapan dalam pilkada OKU 9 desember 2020 kemarin Bawaslu melihat ada beberapa hal yang perlu ditekankan dan digaris bawahi untuk pelaksanaan pemilu ke depannya seperti dalam proses sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai antara target sosialisasi dan pemateri sosialisasi sehingga tidak merepresentasikan kebutuhan dari target sosialisasinya. Selain itu hal yang masih menjadi sorotan dari Bawaslu OKU adalah praktek *money politic* yang dilakukan beberapa oknum tim pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati OKU, namun yang menangkap tangan oknum yang membagikan uang dan paket sembako adalah

kelompok masyarakat partisipan dari kolom kosong, bukan tim dari Bawaslu sehingga laporan tidak dapat di proses lebih lanjut.

Pengamatan dari sisi masyarakat mengenai proses pilkada OKU di tengah situasi pandemi covid-19, masyarakat melihat bahwa kinerja KPU dalam proses pilkada ditengah pandemi sudah cukup baik, meskipun sempat terhambat dalam tahap-tahapannya karena keterbatasan situasi dan perubahan regulasi dari Pusat. pilkada seerentak ini harus tetap dilaksanakan di OKU mengingat dampak yang akan terjadi jika target pelaksanaan pilkada serentak ini tertunda, sehingga nantinya akan memakan lebih banyak anggaran Negara untuk pelaksanaan pilkada yang tertunda. KPU OKU banyak memanfaatkan sosial media dan mengikuti perubahan teknologi serta kebiasaan masyarakat saat ini ditengah situasi pandemi yang banyak mengurangi mobilitas dan mengurangi interaksi secara langsung namun aktif memanfaatkan sosial media untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui jejaring maya, dan masyarakat menilai partisipasi politik di OKU meskipun pilkada dilaksanakan ditengah situasi pandemi covid-19 mencapai 74% dan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada juga dilaksanakan dengan cukup baik. Hal yang masih terus menjadi sorotan selama proses penyelenggaraan Pilkada di OKU ini masih terdapatnya *money politic* yang mencederai proses demokrasi di kabupaten OKU, mindset sebagian masyarakat yang mau memilih paslon jika mendapatkan uang masih sulit dirubah sehingga masyarakat masih memerlukan edukasi mengenai *money politic*. Yang tidak kalah penting adalah penguasaan teknologi dan kemampuan bagi para penyelenggara pemilu juga bagi masyarakat agar dapate terus mengikuti perubahan, sehingga mendekatkan jarak kepada proses demokrasi kedepannya dapat berbasis teknologi terbaru seperti misalnya penggunaan aplikasi untuk melakukan pemilu.

Strategi Pelaksanaan Pilkada OKU Pada Masa Pandemi covid-19 dengan 6 poin dari model pemilihan strategi Marwell dan Schmitt yakni janji (*promising*) KPU sebagai eksekutor penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kami mengajak masyarakat untuk mengukir sejarah dalam hal memilih jadi pandemi ini bukan untuk ditakuti tapi dibalik situasinya kalau masyarakat ingin mencoba hal baru seperti memilih dengan mnegggunakan masker maka sekaranglah saatnya masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya ;"Ancaman (*threatening*)" KPU setiap hari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk wajib memilih, masyarakat harus memilih dan menggambarkan kerugian masyarakat yang kehilangan kesempatan menyampaikan aspirasinya dan itu setiap saat disosialisasikan dalam setiap tahapan dan disetiap desa maupun di KPPS ;Strategi "tawaran (*pregiving*)" yang dilakukan dalam menghadapi situasi ini membutuhkan sosialisasi yang agak lebih kompleks

dengan memberikan logika kepada masyarakat bahwa berpartisipasi pada pilkada dimasa pandemi merupakan momen menarik yang mungkin tidak dapat terulang karena pandemi mungkin hanya terjadi dalam 200 tahun sekali sehingga masyarakat harus mencobanya

Strategi selanjutnya “mengarah pada kewajiban moral (*making moral appeals*)” strategi yang digunakan dengan menyampaikan pesan-pesan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan muatan kewajiban moral masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pilkada OKU ditengah situasi pandemi sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab masyarakat sebagai warga negara yang baik ;”mengetahui hasil positif (*showing expertise about positif outcomes*)” penyelenggara pemilu menunjukkan seberapa baik hal yang terjadi jika masyarakat patuh untuk mengikuti pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya namun tetap terjaga dari paparan virus covid-19 :”mengetahui hasil negatif (*showing about negatif outcomes*)” penyelenggara pemilu menunjukkan seberapa buruk yang terjadi jika masyarakat tidak patuh untuk mengikuti pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan, yang dapat mengakibatkan penyebaran virus covid-19 semakin luas.

KESIMPULAN

Hasil temuan dilapangan mengenai strategi pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten OKU ditengah pandemi covid-19 antara lain dengan melakukan sosialisasi pilkada dalam jumlah peserta terbatas dan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial dalam platform instagram dan facebook, serta penyiaran pesan ajakan untuk berpartisipasi dalam pilkada secara berulang-ulang melalui media konvensional yakni radio lokal. KPU juga mengadakan diskusi dengan tokoh masyarakat dalam jumlah peserta terbatas dan tetap menajalankan protokol kesehatan melalui acara “NGOPI (Ngobrol Pilkada) dan KPU juga mengadakan lomba swafoto di TPS pada saat pilkada berlangsung agar menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada ditengah situasi pandemi covid-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menggunakan handsanitizer serta meminimalisir kontak dalam pelaksanaan pilkada.

REFERENSI

Baxter, A.L., & Babbie, E. (2004). *The Basic of Communication Research*. Belmont, CA: Wadsworth.

- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, W. John. (2009). *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd edition. USA: SAGE Publication.
- Flick, U. (1998). *An Introduction to Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Iqbal, M. (2020, juni 10). Kontroversi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10064311/kontroversi-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. (2009). *Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Patton, M.Q. (2002) *Qualitative Research an Evaluation Methods (3rded.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). *Komunikasi Politik; Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus dan Negarawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sarjan, Kemal Al Kondi Mulya dan Siti Chadijah. (2020). *Problematika dan Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Rechtstsgel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Agustus 2020* <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/6620>
- Scrooder, Peter. (2009). *Strategi Politik*. Jakarta: FNS
- Soyomukti, Nurani. (2013). *Komunikasi Politik; Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat dan Penguasa*. Malang: Intrans Publisher
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. (2014). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*.
- West, R. & Turner, H., L. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, 3rd ed. Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.